

ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Faisal Hidayat¹, Miftahurrahmah², Muhammad Rais³, Ainul Mardhiah⁴

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ^{1,3}

Institut Agama Islam Sumatera Barat ²

Universitas Negeri Padang ⁴

*Corresponding Author:

faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan melihat dan menganalisis maqashid syariah melalui PDRB perkapita (Hifzul Maal), tingkatan kemiskinan (Hifzud Din), jumlah penduduk (Hifzun Nafs), tingkatan pengangguran terbuka /TPT (Hifzun Nasb), tingkatan Pendidikan (Hifzul Aql) yang memperangaruhi ketimpangan distribusi pendapatan) di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011 sampai tahun 2020. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan efek tetap (fixed effect/FEM) dalam penganalisisan regresi data panel.

Setelah model FE di tranformasi kedalam bentuk logaritma, sehingga mendapatkan hasil dengan pengujian variabel bebas secara bersama yaitu PDRB perkapita, tingkatan kemiskinan, jumlah penduduk serta tingkatan pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2020. Pada uji parsial PDRB perkapita, jumlah penduduk dan tingkatan pengangguran terbuka berkorelasi negatif (berbanding terbalik) serta tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Akan tetapi tingkatan kemiskinan memiliki hubungan positif (berbanding lurus) serta tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan..

Kata Kunci: PDRB, Maqashid Syariah, Ketimpangan

ABSTRACT: This research aims to look at and analyze maqashid syariah through GRDP per capita (Hifzul Maal), poverty level (Hifzud Din), population (Hifzun Nafs), open unemployment rate / TPT (Hifzun Nasb), education level (Hifzul Aql) which affect distribution inequality income) in West Sumatra Province from 2011 to 2020.

After the FE model is transformed into logarithmic form, so to get results by testing the independent variables together, namely GRDP per capita, poverty level, population, and open unemployment rate have a significant influence on income inequality (gini ratio) in West Sumatra in the period time from 2011 to 2020. In the per capita GRDP partial test, the number of residents and the level of open unemployment have a negative correlation (inversely) and are not significant for inequality in income distribution. However, the poverty level has a positive (directly proportional) and insignificant relationship to income distribution inequality.

Kata Kunci: PDRB, Maqashid Syariah, Disparitas

A. PENDAHULUAN

Sebagai Provinsi yang mengedepankan syariat Islam dengan falsafah “*Adaik basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah*” Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari tinjauan maqashid syariah, terutama dalam hal ekonomi khususnya permasalahan pada pemerataan distribusi pendapatan daerah. Meskipun dalam 5 tahun terakhir peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Sumatera Barat tercatat sebesar Rp 43.268 bertumbuh lebih baik

daripada perkembangan PDRB perkapita ditingkat nasional tercatat hanya sebesar Rp 39.946 (BPS, 2021). Tetapi peningkatan angka PDRB perkapita yang besar tersebut belum diiringi dengan pemerataan pendistribusian pendapatan antar kota/kabupaten di provinsi ini. Seperti yang terlihat di Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman serta Kota Padang dengan rata-rata angka gini rasio 0,30-0,38. Sebaliknya kota/kabupaten yang lain memiliki angka gini rasio 0,26-0,30 saja. (BPS, 2020)

Angka PDRB perkapita ialah parameter ukuran kesejahteraan penduduk wilayah, apabila satu daerah mengalami peningkatan angka PDRB perkapita maka sumber penerimaan daerah juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat (Sun'an, 2015). Hal ini berarti tingginya PDRB perkapita penduduk yang tinggal di wilayah tersebut menjadi sejahtera dan terjadinya pemerataan pendapatan (Hartini, 2017a). Kota Padang mempunyai PDRB perkapita teratas (sekitar Rp 41.000) dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, kota inimerupakan pusat segala aktivitas bidang ekonomi serta berbagai macam faktor produksi tersedia disana. Tidak hanya PDRB perkapita, kemiskinan juga berdampak pada tingkat pendapatan rata-rata dan ketimpangan distribusi pendapatan (Aryunah, 2017).

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Barat memiliki penduduk miskin Bulan September 2017 berjumlah 359.990 orang mengalami pengurangan sebanyak 2.860 orang menjadi 357.130 orang di Maret 2019 (BPS, 2020). Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, jika akumulasi jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan akumulasi kegiatan ekonomi berakibat pada pendapatan perkapita rendah serta angka rasio ketergantungan penduduk yang tinggi. Selain itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi faktor penyebab ketidakmerataan pendapatan masyarakat. Terdapatnya tingkatan pengangguran mengindikasikan keadaan ketenagakerjaan yang belum terserap secara optimal guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa peneliti telah mengangkat isu ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian Hartini pada tahun 2017 menjelaskan bahwa, PDRB perkapita berkorelasi positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan (Hartini, 2017a). selanjutnya Musafir (2012) meneliti tentang angka laju penduduk yang memberikan pengaruh pada pendistribusian pendapatan, penelitian ini menghasilkan pengaruh jumlah penduduk yang positif tetapi tidak signifikan. Rahman dan Syamsir pada tahun 2018 meneliti tentang pengangguran terbuka yang berdampak pada kesenjangan distribusi pendapatan, dan menemukan hasil jumlah tingkatan pengangguran berkorelasi signifikan positif terhadap kesenjangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (Syamsir & Rahman, 2018). Selanjutnya Penelitian Sapparuddin pada tahun 2015 mengemukakan bahwasannya pendistribusian keuangan negara harus menjamin keadilan sosial, serta tidak tertumpu pada suatu kelompok, golongan daerah saja namun kemiskinan hal yang menjadi *Sunnatullah* (Saparuddin, 2015).

Berbeda pada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang menggunakan metode deskriptif atau menganalisa dengan alat regresi linear berganda serta regresi data panel berlangsung empat sampai lima tahun saja dalam menganalisis, disamping itu peneliti terdahulu hanya mempelajari kesenjangan distribusi pendapatan di daerah Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara. Namun kajian ini dilakukan pada rentang tahun 2011 sampai tahun 2020 selama sepuluh tahun dalam menganalisis masalah ketimpangan distribusi pendapatan provinsi Sumatera Barat pada tiap kota/kabupaten. Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, kajian ini untuk memberikan pengetahuan dan menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat yang menggunakan jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk, PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan sebagai faktornya, kemudian diuraikan dalam pendekatan *Maqashid Syariah*.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai metode kuantitatif dimana PDRB perkapita, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan variabel dependennya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan yang dinilai dari angka rasio gini, kemudian ditelaah dalam prespektif maqashid syariah.

Data sekunder penelitian ini ialah data panel yang didefinisikan sebagai penggabungan data tahunan (*times series*) dan data bertingkat /*cross section* (Siyoto & Sodik, 2015). Data tersebut didapatkan, dikumpulkan serta disatukan dalam kajian-kajian terdahulu atau yang telah dipublikasikan oleh instansi. Data yang diperoleh terdiri dari data ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio) data, PDRB perkapita, data tingkat kemiskinan, data jumlah penduduk dan data tingkat pengangguran terbuka seluruh kabupaten/kota Sumatera Barat. Keseluruhan data diambil berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat pada jangka waktu penelitian tahun 2011-2020. Pengumpulan data yang dipakai dalam menemukan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan langkah dalam mengumpulkan data penelitian melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan terbentuklah persamaan analisis regresi data panel tetapi sebelum melakukan penganalisisan seluruh variabel-variabel pada persamaan tersebut diubah terlebih dahulu menjadi bentuk logaritma. Dibawah ini akan ditampilkan persamaan sebelum dimodifikasi kedalam logaritma:

$$IGIt=0+1 PDRB kptit+ 2 TKIt+3 JPit+ 4TPTit+5TPit+ 6\epsilon$$

Setelah dilalukan pentransformasian dengan bentuk logaritma didapatlah persamaan regresi data panel setelah sebagai berikut:

$$\text{Log}IGIt=0+1 \text{Log}PDRB kptit+ 2\text{Log} TKIt+3 \text{Log}JPit+ 4\text{Log}TPTit+ \text{Log}5Tpit +\epsilon$$

Dimana	: IG /GR	= Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Rasio)
	PDRB	= PDRB Perkapita
	TK	= Tingkat Kemiskinan
	JP	= Jumlah Penduduk
	TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
	TP	= Tingkat Pendidikan
	B ₀	= Konstanta
	B ₁ B ₂ B ₃ B ₄ B ₅	= Koefisiesn regresi berganda
	i	= Entitas
	t	= Waktu
	ε	= Standar eror
	Log	=Logaritma linier

Setelah persamaan model didapat tahap selanjutnya menganalisis regresi data panel untuk pengujian dampak jumlah penduduk, PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio), harus melalui

langkah-langkah antara lain: pemilihan persamaan regresi data panel Random Effect Model (REM) Common Effect Model dan (CEM), Fixed Effect Model (FEM), pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Data penelitian dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews 9, selanjutnya pengujian pertama yang dilakukan adalah pemilihan antara CEM dan FEM dilakukan dengan Uji Chow dan pemilihan antara REM dan FEM dilakukan dengan Uji Hausman menetapkan model yang tepat. Dengan kedua pengujian tersebut didapatkanlah model paling tepat yaitu model pendekatan efek tetap (fixed effect model/ FEM).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan terpilihnya pendekatan efek tetap (FEM/FE) setelah melewati proses pengujian chow dan pengujian hausman. Model FE juga telah melewati berbagai tahapan seperti terbebas dari asumsi klasik. Setelah itu menguji hipotesis penelitian dengan berbagai langkah sebagai berikut: pengujian secara simultan pengaruh variabel bebas, koefisien determinasi dan juga pengujian parsial terhadap model FEM. Dari pengujian hipotesis penelitian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.497761	Mean dependent var	-1.168417
Adjusted R-squared	0.395453	S.D. dependent var	0.122356
S.E. of regression	0.095135	Akaike info criterion	-1.708961
Sum squared resid	0.977472	Schwarz criterion	-1.204156
Log likelihood	134.9370	Hannan-Quinn criter.	-1.503836
F-statistic	4.865326	Durbin-Watson stat	2.247925
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews 9, data diolah

Dapat dilihat 1.1 bahwa nilai (F-statistic) adalah 0.000000. Jika nilai F-hitung kecil dari taraf nyata= 5% maka hasil pengujian F positif signifikan yakni tolak H_0 dan terima H_a , bisa diinterpretasikan yakni ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio) dengan angka pengaruh sebesar 49,78% dipengaruhi tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk. Sisanya 50,22 % dipengaruhi faktor-faktor lain yaitu rendahnya mobilitas sosial, Human Development Index (HDI), ketidakmerataan pembangunan, hasil sumber daya alam, investasi dan kenaikan harga secara terus menerus (inflasi) dan yang terdapat di luar model penelitian.

Tabel 2. Hasil Pengujian Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.347261	3.662374	1.733100	0.0859
LOGPDRBP	-0.005854	0.021899	-0.267316	0.7897
LOGTK	0.001722	0.020717	0.083133	0.9339
LOGJP	-0.608681	0.307329	-1.980551	0.0502
LOGTPT	-0.000521	0.026564	-0.019605	0.9844
LOGTP	-0.005283	0.022836	-0.226114	0.7683

Sumber : Eviews 9, data diolah

Tabel 1.2 memberikan informasi nilai probabilitas PDRB per kapita sebesar 0,7897, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak karena angka probabilitas tinggi dari 5% yang berarti PDRB perkapita (*Hifzul Maal*) berkorelasi negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio). Temuan ini tidak sesuai dengan Hartini pada tahun 2017 yang menemukan korelasi PDRB perkapita dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah positif signifikan (Hartini, 2017b). Lebih lanjut Rahma (2018) menemukan korelasi positif signifikan antara produk domestik regional bruto perkapita dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun temuan penelitian sejalan dengan Avriandaru (2018): PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015, disebabkan angka PDRB perkapita Kabupaten/Kota berbeda-beda (Avriandaru, 2018). Temuan penelitian sangat cocok dengan teori Kuznet yang menjelaskan terdapat korelasi pertumbuhan ekonomi (PDRB perkapita) dengan ketidakmerataan pendapatan, penjelasan ini dikenal dengan Inverted U-curve Hypothesis atau hipotesis kurva U terbalik.

Pada setiap kota/kabupaten memiliki keunggulan Sumber Daya Alam (SDM) dalam berbagai bidang yang berkontribusi terhadap PDRB untuk mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan di wilayah Sumatera Barat (Yulia et al., 2015). Misalnya saja di wilayah tertinggal serta maju tetapi tertekan yaitu: Kabupaten Pasaman 50,66 persen PDRB kabupaten ini disokong bidang kehutanan, pertanian, dan perikanan. Sektor perikanan, kehutanan dan pertanian menjadi penyumbang pula sebanyak 48,62 persen PDRB dari Kepulauan Mentawai serta 40,45 persen PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (Permana, 2017). Dari informasi tersebut terdapat keterkaitan tingkat pendapatan masyarakat dengan PDRB perkapita, hal itu berarti kabupaten/kota di Sumatera Barat yang membangun perekonomian bermanfaat bagi penduduk sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sekaligus mewujudkan pemerataan (Rahma, 2018).

Pada tingkat kemiskinan (*Hifzun Din*) nilai probabilitas sebesar 0,9339, berarti H_0 ditolak namun H_a diterima disebabkan taraf signifikansi 5% lebih kecil dari nilai probabilitas yang bermaksud bahwa pengaruh tingkat kemiskinan terhadap gini rasio adalah positif dan tidak signifikan. Hasil positif dari temuan riset ini sama, seperti penelitian Bantika pada tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan peningkatan tingkat kemiskinan (Bantika et al., 2015). Selain itu, temuan ini didukung Sudarlan pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Sudarlan, 2019). Studi lain Aryunah (2015) menjelaskan disebabkan perkembangan ekonomi yang pesat, tingkat kemiskinan tidak berdampak signifikan pada kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Malang (Aryunah, 2017). Selain itu Andiny dan Mandasari pada tahun 2017 juga menemukan bahwa di Provinsi Aceh tingkat kemiskinan tidak memberikan dampak signifikan pada tidak meratanya distribusi pendapatan, disebabkan tingginya persentase jumlah masyarakat yang tidak melakukan aktivitas ekonomi sehingga menambah tingkat penduduk miskin (Andiny & Mandasari, 2017).

Meskipun penyaluran pendapatan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak merata, tetapi pada rumah tangga miskin terjadi pemerataan pendapatan penyebab keadaan ini ialah sumber pendapatan setiap keluarga miskin yang sama (Rivandi & Anggraini, 2022). Pendapatan keluarga pada kelompok keluarga miskin cenderung sama karena sumber keuangan relatif merata bersumber dari bidang pertanian dan bidang alternatif yang lain. Selain itu, masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) adalah menjadi alasan turunya angka tingkat kemiskinan dan kesenjangan penyaluran pendapatan, bansos ini bertujuan melepaskan belenggu kemiskinan serta memberikan peningkatan kesejahteraan hidup. Bansos yang dibagikan oleh pemerintahan pusat serta pemda ini didistribusikan pada program Rastra dari Bulog, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di kota/kabupaten Sumatera Barat bansos diwujudkan dalam Bentuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP.

KUBE) yang mengelola berbagai macam usaha: pemeliharaan sapi, cuci motor dan karpet, agraria serta tenun dan sulaman. Progam UEP. Pembuktian kesuksekan program UEP. KUBE ialah dalam penanganan fakir miskin di tahun 2016 Sumatera Barat menjadi terbaik nasional. Pencapaian tidak terlepas dari kerjasama antara pemda dengan dinsos Sumatera Barat untuk mendampingi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program supaya terlaksana dengan semestinya, agar manfaat program melalui peningkatan penghasilan dapat dinikmati kelompok penduduk miskin.

Nilai probabilitas yang diperoleh pada variabel jumlah penduduk (*Hifzun Nafs*) adalah 0,0502 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan taraf nyata 0,05 didapat bahwa pengaruh negatif tidak signifikannya jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio). Temuan ini sesuai riset Dewi (2015) menunjukkan bahwa korelasi jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tidak signifikan Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional /SUSENAS (Statistik, 2018), rasio gini pedesaan dan daerah kota di Sumatera Barat tahun 2018 yaitu 0,280 dan 0,338. Data ini menginformasikan bahwa lebih meratanya distribusi pendapatan di pedesaan jika dibandingkan di perkotaan. Susunan usia penduduk Sumatera Barat terbentuk atas kelompok-kelompok sebagai berikut: masyarakat berusia 15 tahun kebawah (muda) sebesar 29,65 persen, masyarakat berusia 65 tahun ke atas (tua) dengan prorsi 5,81 persen dan kelompok masyarakat berusia 15-64 tahun (produktif) sebesar 64,54 persen. Pada tahun 2018 penduduk usia produktif yang mengisi lapangan pekerjaan adalah 2,41 juta jiwa, dimana angka ini merupakan jumlah pekerja laki-laki 1,43 juta jiwa bersama pekerja wanita 980,86 jiwa. Populasi usia produktif ini terserap pada sektor pertanian, sektor perkebunan dan perikanan, retail ataupun pedagang eceran, reparasi kendaraan.

Berdasarkan penjabaran Tipologi Klassen (Sjafrizal & Elfindri, 2008), penduduk Sumatera Barat yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan serta perikanan menempati Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan keadaan wilyah maju tapi tertekan dan juga Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah berkembang cepat dimana penduduk melakukan usaha pada sektor perdagangan rata-rata berdomisili daerah berkembang dan maju/daerah tingkat II. Kegiatan perdagangan menjadi penyerap pekerja terbanyak dan sektor ini juga sangat kontribusi pada PDRB Sumatera Barat. Bukan hanya pada lapangan usaha perdagangan penduduk Sumatera Barat bekerja pada usaha perkebunan dan pertanian, perikanan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta industri rumah tangga untuk keberlangsungan kehidupan (Hafni & Rozali, 2015). Dikarenakan karakter rakyat Sumatera Barat yang suka bergadag dimasa lampau, masyarakat memilih UMKM dan industri rumah tangga menjadi satu diantara cara mendapatkan penghasilan guna mencukupi hajat kehidupan. Pada tahun 2018 UMKM yang mencakup pelaku usaha mikro sebesar 423.280, pelaku usaha kecil sebesar 74.410, pengelola usaha menengah dan besar 3.720 usaha, ada di setiap kota/kabupaten Sumatera Barat. Kondisi inilah yang mengakibatkan tidak signifikannya jumlah penduduk berpengaruh atas ketidakmeratan pendapatan Sumatera Barat, disebabkan peningkatan kuantitas penduduk disertai produktivitas penduduk usia kerja dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai probabilitas tingkat pengangguran terbuka (*Hisbun Nash*) yaitu 0,0859 berarti menerima H_0 dan menolak H_a karena nilai taraf nyata (0,05) kecil dibandingkan angka probabilitas hitung diinterpretasikan tingkat pengangguran terbuka mempunyai korelasi negatif tidak signifikan atas gini rasio. Penelitian Haryoto pada tahun 2017 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berkurang secara nasional sehingga berdampak pada kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, penjaaran tersebut mendukung temuan penelitian (Haryoto, 2017). Tingginya angka TPT kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat menunjukkan terdapat beberapa tenaga kerja di setiap daerah belum digunakan dengan maksimal untuk mendorong pengembangan perekonomian. Faktor pemicu situasi ini sebagai berikut: taraf pendidikan dan kesehatan belum optimal, sedikitnya kemampuan membayar suatu produk (purchasing power), bertambah jumlah pengangguran, arus migrasi (desa-kota) masih perlu dibenahi dan pertumbuhan perekonomian yang tidak merata. Uph

adalah komponen penting dari masalah ketenagakerjaan, dimana upah merupakan aspek penentu penghasilan seseorang (Ghofur, 2020). Jika tingkat pengangguran mengalami peningkatan maka mengakibatkan angka penentu upah menjadi kecil. Dengan kata lain, kecilnya nilai penghasilan masyarakat berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan distribusi pendapatan masyarakat. Apabila nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Barat meningkat 8,03 persen pada tahun 2019 sebesar Rp 2.289.228 per bulan, dengan peningkatan sebesar Rp 170 ribu dari Rp 2.119.067 per bulan di tahun 2018. Kenaikan UMP bermaksud menekan angka pengangguran serta memotivasi lulusan SMK dan Diploma (usia muda) supaya berpartisipasi di pasar tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan dan menjadi penyeimbang ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Nilai probabilitas Tingkat Pendidikan (*Hifzul Aql*) sebesar 0.7683, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak karena angka probabilitas tinggi dari 5% yang berarti Tingkat Pendidikan (*Hifzul Aql*) berkorelasi negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio) Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan adalah suatu hal yang paling mendasar yang menjadi kebutuhan pada kehidupan dan masyarakat (Sujana, 2019). Pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, jika suatu daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang punya dasar pendidikan mumpuni dan tinggi maka harapannya lebih baik juga dari segi kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerahnya.

Maqashid Syariah

Secara Terminologi, Maqashid Syariah berasal dua kata gabungan dari bahasa arab, Maqashid dan syariah . maqashid berbentuk kata Jamak (banyak) yang berarti Maksud-maksud atau Tujuan-tujuan sedangkan mufradnya (bentuk tunggalnya) dari kata qashd yang berarti satu maksud atau tujuan. Secara istilah, dalam pandangan Imam Ghazali, maqashid syariah berarti pelaksanaan syariah dengan cara menafikan segala macam mudharat sekaligus mengambil manfaat (Al-Ghazali, 2021). Sampai dikenal sebagai kaidah dengan mendapatkan suatu kebaikan dan menolak segala bentuk kerusakan.

Dalam arti lain, maqashid juga berarti maslahat (guna, untung), dan maslahat berarti maqashid, maka selanjutnya penting untuk mengetahui tentang Batasan-batasan pada maslahat. Imam Asy-Syatibi (Khatib, 2018) mengemukakan setidaknya terdapat 5 (lima) hal dalam Maqashid Syariah bisa disebut juga dengan istilah kulliyat al-khamsah (lima hal dasar). Kelima hal dalam maqashid itu ialah, *Hifdzud ad-Din* (menjaga agama); *Hifdzun an-Nafs* (menjaga jiwa); *Hifdzul al-Aql* (menjaga akal); *Hifdzul al-Maal* (menjaga harta); serta *Hifdzun an-Nashab* (menjaga keturunan).

Kriterianya, segala upaya untuk mewujudkan lima hal dalam maqashid ini, hal ini juga termasuk dalam maslahat. Begitu juga sebaliknya, segala upaya yang dapat menghapus lima hal dalam maqashid ini, maka hal ini juga sebagai mudarat, termasuk dalamnya pendistribusian pendapatan daerah.

Sebagai akuntabilitas terhadap aturan keuangan pada suatu negara ada beberapa kriteria yang harus diimplementasikan pada posko-posko pendapatan Sumatera Barat, yaitu:

Pertama, adanya sistem bagi hasil yang harus memadani, mengharuskan hasil pendapatan atau penerimaan negara yang cukup besar dan memadani agar terpenuhinya kebutuhan pemerintah. Oleh sebab itu, bukan hanya sebanyak macam pendapatan, namun juga jumlah dan potensi yang maksimal; *Kedua*, Harus adil serta berimbang, jika ditinjau dari suatu pandangan yaitu: harus imbang (tingkat atau besar pendapatan); mendatar (sumber pendapatan dikenakan); serta geografik (letak lokasi dimana pajak tersebut ditarik).

Kriteria yang ini bertumpu pada nilai manfaat serta nilai daya pikul. nilai manfaat bertujuan supaya hasil penarikan pajak atau pungutan nilainya seimbang dengan nilai manfaat yang didapat (Arsjad et al., 1992). Nilai daya pikul merupakan tujuan objek harus sesuai kemampuan daya bayar wajib pajak atas objek pajak ; *Ketiga*, Tingkat administrasi, semua jenis pemasukan yang berupa pendistribusian daerah tidak sama dalam hal tingkat administrasi. Terdapat perbedaan misalnya: daerah administrasi pusat terdapat wilayah imigrasi, yang mana menjadi pusat bea cukai atau pajak barang impor tinggi (pajak pusat), namun pajak dan tarif retribusi suatu daerahnya biasa saja; dan *Keempat*, Tingkat pengaruh pajak pada perekonomian, dapat dilihat dampak pada guna fungsi pajak, oleh karena ada pungutan yang dapat mengurangi kemampuan memproduksi dan investasi, ada pula yang mendorong kegiatan produksi dan investasi. Segi efisiensi adalah pungutan yang mendorong kegiatan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh PDRB perkapita berkorelasi negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio), mengindikasikan bahwa saat angka PDRB perkapita tinggi namun ketimpangan distribusi pendapatan bernilai rendah, hal ini disebabkan karena kota/ kabupaten di Sumatera Barat memiliki keunggulan sumberdaya alam dalam berbagai bidang unggulan yang berkontribusi terhadap PDRB sebagai usaha dalam pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan ekonomi di wilayah.

Hasil pengaruh tingkat kemiskinan yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat ini memberikan informasi apabila tingkat kemiskinan mengalami peningkatan maka ketimpangan distribusi pendapatan juga mengalami hal yang demikian, penyebab terjadinya kondisi ini adalah pendapatan kelompok keluarga miskin cenderung homogen dan sumber pendapatannya berasal dari pertanian dan mata pencaharian alternatif.

Pada variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan kata lain ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan disisi lain ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan hal ini disebabkan kelompok penduduk usia produktif memilih UMKM dan industri rumahan menjadi salah satu cara mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup yang sejalan dengan karakter masyarakat Sumatera Barat sejak dulu suka bergadang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Tingkat Pendidikan berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah. Sebab Provinsi Sumatera Barat salah satu termasuk dalam penghasil tokoh pendidikan tertinggi di Indonesia. Temuan bisa diartikan bahwa tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan yang terbalik dengan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan lulusan SMK dan Diploma (usia muda) berpartisipasi di pasar tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan agar sesuai dengan Maqashid Syariah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, B. I. (2021). Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali. *Panorama Maqashid Syariah*, 26.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Arsjad, N., Kusumanto, B., & Prawirosetoto, Y. (1992). Keuangan negara. *Jakarta: Intermedia*.

- Aryunah, R. I. (2017). *Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang*.
- Avriandaru, F. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Bantika, V., Benu, O. L. S., & Kapantow, G. H. M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara. *Cocos*, 6(17).
- BPS. (2020). Gini Ratio Sumatera Barat Maret 2019 tercatat sebesar 0,306. *Badan Pusat Statistik*. <https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2020/01/20/815/gini-ratio-sumatera-barat-maret-2019-tercatat-sebesar-0-306.html>
- BPS. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita di Provinsi Sumatera Barat 2019-2021*. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/157/521/1/produk-domestik-regional-bruto-dan-pdrb-per-kapita-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2015). *analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra.
- Hartini, N. T. (2017a). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. *Journal of Economics and Public Policy*, 2(1), 69–79.
- Hartini, N. T. (2017b). Pengaruh pdrb per kapita, investasi dan ipm terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi diy tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Haryoto, E. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. UIN Sunan Kalijaga.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkkm) Di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Rahma, E. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016*.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.
- Saparuddin, S. (2015). Skema Distribusi dalam Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 152–168.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

- Sjafrizal, & Elfindri. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Statistik, B. P. (2018). *Survei sosial ekonomi nasional 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Sudarlan, S. (2019). Dampak Pertambahan Jumlah Penduduk dan Investasi terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita i Indonesia: Studi Kasus 34 Provinsi. *Jurnal Eksis*, 15(1).
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media Penerbit.
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22–42.
- Yulia, Y., Baga, L. M., & Tinaprilla, N. (2015). Peran dan strategi pengembangan subsektor peternakan dalam pembangunan Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 3(2), 159–176.